

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BPODT TA 2024



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA**

Jalan Kapten Pattimura No. 125, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota
Medan, Sumatera Utara 20153 Telp: Telp: (061) 450-2908
Pos El: info@bpodt.id, Laman: www.bpodt.id



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Bernando Panjaitan
Jabatan : Pimpinan BLU - Direktur Utama
Alamat : Jalan Kapten Pattimura No.125 Medan Sumatera Utara

Dengan ini kami sampaikan dokumen Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. PROYEKSI PENDAPATAN

1. Pendapatan BLU BPODT : Rp. 7.200.000.000

b. PROYEKSI BELANJA

Belanja BPODT per 31 Desember 2024 dianggarkan sebesar **Rp 3.454.873.000**.
Rincian Belanja meliputi :

1. Belanja BLU : Rp. 3.454.873.000

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Disahkan di Medan

Pada Tanggal : 05 Juli 2024

**MENGETAHUI
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI DAN
INFRASTRUKTUR
KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF**



Titik Lestari, S.Sn, MM,
NIP. 196910071999032001

**PIMPINAN BLU
BADAN PELAKSANA OTORITA
DANAU TOBA**



Jimmy Bernando Panjaitan

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-nya, penyusunan Rencana Bisni dan Anggaran Tahun 2024 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba telah selesai. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun ini sebagai bentuk gambaran pelaksanaan kegiatan bisnis berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025 dan Indikantor Kinerja Utama (IKU). Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2024 dijadikan sebagai bentuk petunjuk (guide line) pengelolaan kegiatan Operasional Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2024 Badan Pelaksana Otorita DanauToba ini dilakukan melalui mekanisme kerja yang disepakati bersama dari unit-unit yang terdapat di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Proses Penyusunan Perencanaan Bisnis dan Anggaran Tahun 2024 ini diawali dengan menginterpretasikan Visi dan Misi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam bentuk program pengembangan untuk menghasilkan keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap sasaran.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencan Bisnis dan Anggaran Tahun 2024 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kegiatan operasional pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Medan, 03 Juli 2024

Direktur Utama,

Badan Pelaksana Otorita Danau toba

The image shows a circular official stamp of the Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN EKONOMI KREATIF" at the top and "BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA" at the bottom. The center of the stamp also contains the text "BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA". Overlaid on the right side of the stamp is a blue ink signature.

Jimmy Bernando Panjaitan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimum BPODT	9
Tabel 2. Jumlah SDM di Lingkungan BPODT	19
Tabel 3. Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Golongan	19
Tabel 4. SDM BPODT Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	19
Tabel 5. Pagu dan Realisasi Belanja BPODT yang bersumber dari Rupiah Murni TA 2020 - 2023	20
Tabel 6. Pagu dan Belanja Anggaran yang bersumber dari BLU Tahun 2020 - 2023...	20
Tabel 7. Target Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	21
Tabel 8. Rekapitulasi Tanah Milik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	22
Tabel 9. Sarana dan Prasarana Tidak Bergerak	22
Tabel 10. Sarana dan Prasarana Bergerak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2023	23
Tabel 11. Kontrak Kinerja BLU BPODT Tahun 2021 dan Prognosa Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	41
Tabel 12. Rencana Pagu Anggaran BPODT Tahun 2024.....	43
Tabel 13. Rencana Pendapatan BLU Tahun 2022-2025.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Timeline berdirinya BPODT	3
Gambar 2. Struktur Dewan Pengarah BPODT	16
Gambar 3. Struktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai salah satu satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas dan fungsi mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (selanjutnya disebut “Perpres 49/2016”) merupakan landasan hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai badan yang dibentuk untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan Pada tahun 2019 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) ditetapkan sebagai organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dilakukan Keputusan Menteri Keuangan No. 344/KMK.05/2019. Berdasarkan Kepmenkeu No. 344/KMK.05/2019, BPODT ditetapkan sebagai BLU penuh pada tanggal 26 April 2019.

Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan implementasi dari Rencana Startegis Bisinis dalam rangka menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Berdasarkan prognosa, diketahui Kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba akan dapat mencapai target yang baik di Tahun 2023 hal ini didasarkan pada proyeksi pencapaian kinerja per unit Pelayanan yang rata-rata mencapai 90%

Mengacu Pada Proyeksi Kinerja 2023 tersebut, maka disusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024 dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran yang ditargetkan dalam anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38.196.522.000 terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 36.284.362.000 sedangkan dari penerimaan yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 1.912.160.000 yang diproyeksikan akan tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di tahun 2024 Per 2 Juli 2024 sebesar Rp. 3.689.292.261 atau kenaikan 192% dari target penerimaan yang telah ditetapkan di tahun 2024

dengan dasar penerapan tarif tersebut berdasarkan KMK 344/KMK.05/2019 tanggal 26 April 2019.

2. Rencana Penggunaan Saldo awal kas BLU tahun 2024 sebesar Rp. 755.170.701 akan digunakan dalam rangka meningkatkan Layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana amenities dan daya tarik wisata di Toba Caldera Resort.
3. Adapun Faktor – factor yang mempengaruhi target kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dapat dilihat dari kondisi internal dan eksternalnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dari segi *hospitality*, kepemilikan serta penjamin mutu pelayanan di Toba Caldera Resort, sistem pelaporan keuangan yang tepat waktu, peningkatan fasilitas amenities, atraksi dan aksesibilitas dan peningkatan perkembangan teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1. Landasan Hukum Keberadaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010 - 2025;
- j. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2006, tentang kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layana Umum;
- p. Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- q. Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- r. Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum;
- s. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 164/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.2. Sejarah Singkat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Pada tanggal tanggal 11 Agustus 2015, telah dilakukan pertemuan 7 Bupati di wilayah Sumatera Utara, yang bertekad untuk bersatu membangun Danau Toba. Kesepakatan 7 Bupati tersebut kemudian disampaikan didalam forum RATAS pada tanggal 15 Oktober 2015, dan Presiden Jokowi memutuskan agar segera dilakukan langkah persiapan guna Pembangunan dalam industri Kepariwisata. Pada tanggal 6 November 2015, arahan Presiden Jokowi agar mengembangkan 10 destinasi Pariwisata Prioritas. Pada tanggal 4 Januari 2016, Presiden Jokowi menetapkan bahwa “Tahun 2016 adalah Tahun Percepatan, Pastikan Pembangunan pada 10 Destinasi Priorias”. Tahap berikutnya pada tanggal 6 Januari 2016, dalam RAKOR 5 Menteri, disepakati Tindak Lanjut pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, di Universitas Del, Danau

Toba. Pada tanggal 11 Februari 2016 dalam forum RAKOR Setkab disepakati Pembentukan Badan Otorita Danau Toba, yang kemudian dilanjutkan dengan RATAS Pengembangan Danau Toba pada tanggal 2 Februari 2016. Pada tanggal 1 Maret 2016, dilakukan Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Kawasan Danau Toba dan membahas segala persiapannya dalam forum RATAS tentang Pengembangan Danau Toba. Pada tanggal 13 Juni 2016, dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2016, tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Kemudian dilanjutkan dengan RATAS pada tanggal 20 Agustus 2016 di Hotel Inna Parapat dengan agenda: (1) Poros Maritim; (2) Percepatan Danau Toba. Selanjutnya atas arahan Presiden Jokowi, pada tanggal 10 sd 13 Oktober 2016, dilakukan kunjungan Pemprov/Pemkab terkait ke West Lake, Hangzhou. Pendirian BPODT sebagai Satker di bawah Kemenparekraf/Baparekraf ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2016, tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Lebih detail terkait sejarah pendirian BPODT dapat dilihat pada gambar



dibawah ini:

Gambar 1. Timeline berdirinya BPODT

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, hak pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba diberikan kepada Badan Otorita Danau Toba. Luasan Kawasan Pariwisata Danau Toba tersebut paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang terdiri atas kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif. Kawasan Koordinatif yang meliputi 8 (delapan) kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Dairi
2. Kabupaten Humbang Hasundan
3. Kabupaten Karo
4. Kabupaten Samosir
5. Kabupaten Toba
6. Kabupaten Simalungun
7. Kabupaten Tapanuli Utara
8. Kabupaten Pakpak Bharat.

Adapun Zona Otoritatif, berlokasi di Sibisa, Kabupaten Toba dengan luas lahan sekitar 386 hektar. Untuk menuju lokasi Danau Toba, terdapat beberapa alternatif moda transportasi, yaitu menggunakan transportasi darat (mobil, motor, dan kereta api) dan udara dimana saat ini tengah dikembangkan 1 (satu) bandar udara terdekat, yaitu: Bandar Udara Sibisa. Waktu Perjalanan yang harus ditempuh oleh wisatawan dari Dari Medan sekitar 4 jam (170 Km) dan dari Silangit sekitar 1 jam (77 Km).

1.3. Karakteristik Kegiatan/ Layanan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan rencana strategis, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi:

- a. Mengkaji dan mengembangkan pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern;
- b. Meningkatkan infrastruktur fisik (Amenistas, Aksesibilitas, Atraksi) di Toba Caldera Resort;
- c. Meningkatkan Pelayanan Prima melalui penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mendukung Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba;

- d. Meningkatkan Pelayanan Prima melalui peningkatan penyelenggaraa event di TCR (Toba Caldera Resort);
- e. Meningkatkan Pelayanan Prima melalui peningkatan Kerjasama KSO dengan pihak ketiga;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuanitas SDM di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba melalui pelatihan-pelatihan/diklat dan izin belajar;
- g. Menyelenggarakan sistem manajemen organisasi yang kredibel, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip berkeadilan serta sistem penjamin mutu;
- h. Mengembangkan kegiatan unit usaha dalam rangka pengelolaan BLU.

1.4. VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan gambaran umum terkait kondisi/keadaan yang ingin dicapai oleh BPODT dalam periode perencanaan, yaitu 2021-2025. Di dalam visi biasanya terdapat tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depa. Penyusunan visi BPODT 2021-2025 dilakukan dengan mempertimbangkan visi dari Kemenparekraf/Baparekraf periode 2021-2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara visi BPODT sebagai Satker yang ada di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dengan visi Kemenparekraf/Baparekraf. Dengan demikian, tujuan BPODT sejalan dengan tujuan Kemenparekraf/Baparekraf dan pencapaian terhadap visi BPODT akan berkontribusi terhadap pencapaian visi Kemenparekraf/Baparekraf. Berikut adalah visi BPODT untuk periode 2021-2025:

“Menjadikan Kawasan Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia Yang Mengutamakan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Visi Kemenparekraf/Baparekraf”

Secara umum, BPODT memiliki visi untuk menjadikan kawasan Danau Toba, baik kawasan koordinatif maupun kawasan otoritatif, sebagai destinasi pariwisata yang menjadi pilihan wisatawan dunia dengan mengedepankan kearifan lokal yaitu sumber daya maupun SDM di sekitar kawasan Danau Toba. Visi ini merupakan bagian dari upaya dalam mendukung Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024. Visi ini mengandung 3 (tiga) *keyword*, yaitu:

- **Kawasan Danau Toba:** Kawasan danau toba yang dimaksud adalah kawasan yang dikelola/dikembangkan oleh BPODT, yaitu terdiri dari kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif. Kawasan koordinatif merupakan kawasan yang dikembangkan/dikelola melalui fungsi koordinatif BPODT, dimana dalam pengembangan kawasan tersebut BPODT secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan kawasan otoritatif adalah kawasan yang dikelola/dikembangkan oleh BPODT melalui fungsi otoritatif. Berdasarkan Perpres no. 49 tahun 2016, BPODT diberikan hak pengelolaan terhadap 500 Ha lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu yang dikelola secara profesional oleh BPODT.
- **Destinasi Pariwisata Dunia:** BPODT selaku Badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata danau toba berkomitmen untuk menjadikan kawasan pariwisata danau toba menjadi destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan nusantara (wisnus), tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman). Oleh sebab itu dalam pengembangan kawasan pariwisata danau toba, BPODT menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang berpedoman pada The World Tourism Organization (UNWTO) dan Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
- **Mengutamakan kearifan lokal:** Pengembangan pariwisata danau toba menjadi destinasi kelas dunia tidak menghilangkan kearifan lokal, justru BPODT berkomitmen untuk mengutamakan kearifan lokal dalam pengembangan tersebut. Dalam pengembangan kawasan pariwisata danau toba, BPODT memberdayakan sumber daya manusia di sekitar kawasan danau toba, melakukan pengembangan kawasan pariwisata danau toba secara berkelanjutan, memajukan dan melestarikan alam dan budaya lokal, serta mengangkat alam, budaya, kuliner, serta produk kreatif lokal sebagai salah satu daya tarik wisata. Dengan demikian keberadaan kawasan pariwisata danau toba memiliki dampak positif terhadap kelestarian budaya lokal dan perekonomian masyarakat serta kemajuan wilayah sekitarnya.

MISI

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BPODT dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, berikut adalah misi BPODT untuk periode 2021-2025:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata Kawasan Danau Toba berkualitas dan berkesinambungan
2. Menumbuhkembangkan investasi pariwisata di Kawasan Pariwisata Danau Toba yang kondusif
3. Mengembangkan industri dan kelembagaan di Kawasan Pariwisata Danau Toba yang berdaya saing
4. Melaksanakan pemasaran pariwisata komprehensif berdasarkan segmen pasar utama
5. Meningkatkan *good corporate governance* Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

1.5. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI ORGANISASI DAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan satuan kerja di bawah Kemenparekraf/Baparekraf yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Pendirian BPODT bertujuan untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, BPODT memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Pariwisata Danau Toba.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Sebagai Badan yang menerapkan PPK-BLU, BPODT berkewajiban untuk menyusun SPM. Ketersediaan SPM merupakan salah satu syarat administratif bagi instansi pemerintah yang ingin menerapkan PPK-BLU. Penyusunan SPM BPODT bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh BPODT dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penyusunan standar layanan BPODT dilakukan dengan memenuhi kaidah “SMART” (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely*), yaitu: (a) fokus pada jenis layanan, (b) dapat diukur, (c) dapat dicapai, (d) relevan dan dapat diandalkan, dan (e) tepat waktu.

Berikut adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT):

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimum BPODT

NO.	LAYANAN DASAR	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	TARGET PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian Kawasan Koordinatif	Ketersediaan Rencana Induk di Kawasan Koordinatif	Tersedia dan dilakukan pemutakhiran setiap 5 tahun sekali	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Rencana Induk Kawasan Koordinatif disusun untuk jangka waktu 25 tahun dan dimutakhirkan setiap 5 tahun sekali
		Pengawasan implementasi Rencana Induk	Tersedianya laporan implementasi rencana induk setiap 6 (enam) bulan sekali	2021-2024	Semua Direktorat	Setiap Direktorat bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi Rencana Induk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
		Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian Kawasan Koordinatif	Terlaksananya rapat antar <i>stakeholder</i> Kawasan Koordinatif Danau Toba minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata: koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam bidang industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan, termasuk di dalamnya investasi.
		Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian Kawasan Koordinatif	Terlaksananya rapat antar <i>stakeholder</i> Kawasan Koordinatif Danau Toba minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Direktorat Destinasi Pariwisata: koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam bidang yang berhubungan dengan destinasi pariwisata mencakup atraksi, akses, dan amenitas.
		Pemantauan konservasi alam Kawasan Danau Toba	Tersedianya komitmen pemangku kepentingan untuk pelestarian lingkungan	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Komitmen pemangku kepentingan atas kelestarian lingkungan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Lingkungan.

NO.	LAYANAN DASAR	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	TARGET PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			Tersedianya laporan pemantauan lingkungan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali			Tim pemantauan lingkungan Kawasan Danau Toba akan dibentuk dan akan memantau aspek lingkungan, tata ruang, dan mitigasi bencana
2	Perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Zona Otoritatif	Implementasi rencana induk	Terimplementasi sesuai target waktu pada rencana induk	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Sesuai dengan target waktu pada rencana induk
		Jaminan keamanan	Tersedianya keamanan 24 jam; tersedia <i>crisis center</i>	2021-2024	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	Koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga
		Jaminan keselamatan	Dilakukannya sosialisasi K3 untuk mencapai kondisi <i>zero accident</i>	2021-2024	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	Sesuai dengan target pencapaian ISO 45001 pada tahun berjalan
		Ketersediaan infrastruktur dan utilitas dasar:				
		a. Jalan	Terbangun sesuai target rencana induk dengan kondisi jalan mantap	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau badan usaha swasta di bidang jalan
		b. Air bersih	Terbangun sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan 24/7	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D, BUMD, masyarakat dan/atau badan usaha swasta di bidang air bersih
		c. Listrik	Terbangun sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan 24/7	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan BUMN dan/atau badan usaha swasta di bidang penyediaan listrik
		d. Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	Terbangun sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan 24/7	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan BUMN dan/atau badan usaha swasta di bidang telekomunikasi

NO.	LAYANAN DASAR	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	TARGET PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		e. Drainase	Tersedia sesuai target rencana induk dengan kondisi saluran lancar	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D dan/atau pihak ketiga lainnya
		f. Air limbah	Terbangun sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan 24/7	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D dan/atau pihak ketiga lainnya
		g. Persampahan	Tersedia sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah secara reguler	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau badan usaha swasta di bidang persampahan
2	Perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Zona Otoritatif	h. Transportasi umum dalam Zona Otoritatif	Terbangun sesuai target rencana induk dengan ketersediaan layanan 24/7	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau badan usaha swasta di bidang penyediaan transportasi umum
		i. Ketersediaan ruang terbuka hijau	Minimal 20% dari total wilayah yang dikelola	2021-2024	Direktorat Destinasi Pariwisata	-
		j. Pengembangan desa penyangga	Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Desa Sigapiton, Desa Motung, dan Desa Pardamean Sibisa	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	Koordinasi dengan Pemda Toba Samosir serta masyarakat
3	Kerja sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga	Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak ketiga	Terimplementasi minimal 1 (satu) kerja sama setiap tahun	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	-
		Keterlibatan masyarakat setempat	Mengutamakan keterlibatan masyarakat setempat	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	-

NO.	LAYANAN DASAR	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	TARGET PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4	Pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan dan non-perizinan	Ketersediaan informasi terkait kebutuhan, persyaratan, dan mekanisme perizinan dan non-perizinan yang mudah diakses	Tersedia <i>website</i> ; <i>update</i> sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	-
		Ketersediaan SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) pelayanan terpadu satu pintu	Tersedia dan terimplementasi	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	-
		Durasi penerbitan izin	Paling lama 7 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima	2021-2024	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	-
		Ketersediaan kantor pelayanan terpadu satu pintu yang mudah diakses	Tersedia, mudah diakses dan berfungsi baik	2021-2024	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	-
		Ketersediaan sistem pendaftaran <i>online</i>	Tersedia, mudah diakses dan berfungsi baik	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	-
5	Pengembangan SDM dan organisasi	Peningkatan kapasitas <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> untuk masyarakat setempat	Min. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	Contoh program: pengenalan <i>geosite</i> untuk masyarakat setempat; edukasi sadar wisata untuk masyarakat setempat, dsb. Contoh bentuk kegiatan: seminar, lokakarya, kursus singkat, dsb.
		Penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendukung pengembangan	Min. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata	Contoh kerja sama: beasiswa, magang; penyerapan lulusan dsb.

NO.	LAYANAN DASAR	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	TARGET PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		pariwisata kawasan Danau Toba				
		Peningkatan kapasitas <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> untuk pengelola	Min. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik	Contoh bentuk kegiatan: seminar, lokakarya, , studi banding, dsb
6	Pemasaran dan promosi pariwisata	Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata tahunan	Rutin setiap tahun	2021-2024	Direktorat Pemasaran Pariwisata	Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata
		Penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata (<i>branding</i>)	Dipublikasikan melalui media promosi dengan durasi akumulatif min. 2 bulan dalam 1 tahun, dan aktif berpartisipasi dalam <i>event</i> promosi min. 3 kali dalam 1 tahun	2021-2024	Direktorat Pemasaran Pariwisata	Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata Contoh media promosi: media cetak, <i>billboard</i> , iklan televisi, iklan radio, dukungan kegiatan/ <i>sponsorship</i> , dsb.
		Ketersediaan <i>marketing tools</i> dan kits pariwisata	Tersedia untuk setiap kegiatan promosi dan pemasaran	2021-2024	Direktorat Pemasaran Pariwisata	Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata
		Fasilitasi kegiatan penjualan wisata(<i>selling</i>)	Min.4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun	2021-2024	Direktorat Pemasaran Pariwisata	Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata

1.2. NILAI BUDAYA BLU BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Berikut adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan oleh seluruh individu di lingkungan BPODT dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi:

✓ **T: *Teamwork*:**

BPODT mengedepankan kerja tim daripada kerja personal. Keberhasilan organisasi merupakan keberhasilan Bersama, hasil kolaborasi tim yang terbangun dengan baik

✓ **O: *Orientasi pelanggan*:**

Pelanggan adalah raja. SDM BPODT mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan. Orientasi pelanggan juga bermakna pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan.

✓ **B: *Berintegritas tinggi*:**

SDM BPODT harus memiliki integritas tinggi terhadap BPODT. Komitmen dalam memberikan yang terbaik untuk mewujudkan BPODT berkinerja tinggi dituangkan dalam perjanjian kinerja pegawai

✓ **A: *Akuntabel*:**

Akuntabel merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh segenap SDM BPODT. Akuntabel ditunjukkan dalam konteks profesional maupun hubungan kerja.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 susunan organisasi BPODT terdiri atas: 1) Dewan Pengarah; dan 2) Badan Pelaksana.

➤ **Dewan Pengarah**

Dewan Pengarah terdiri atas:

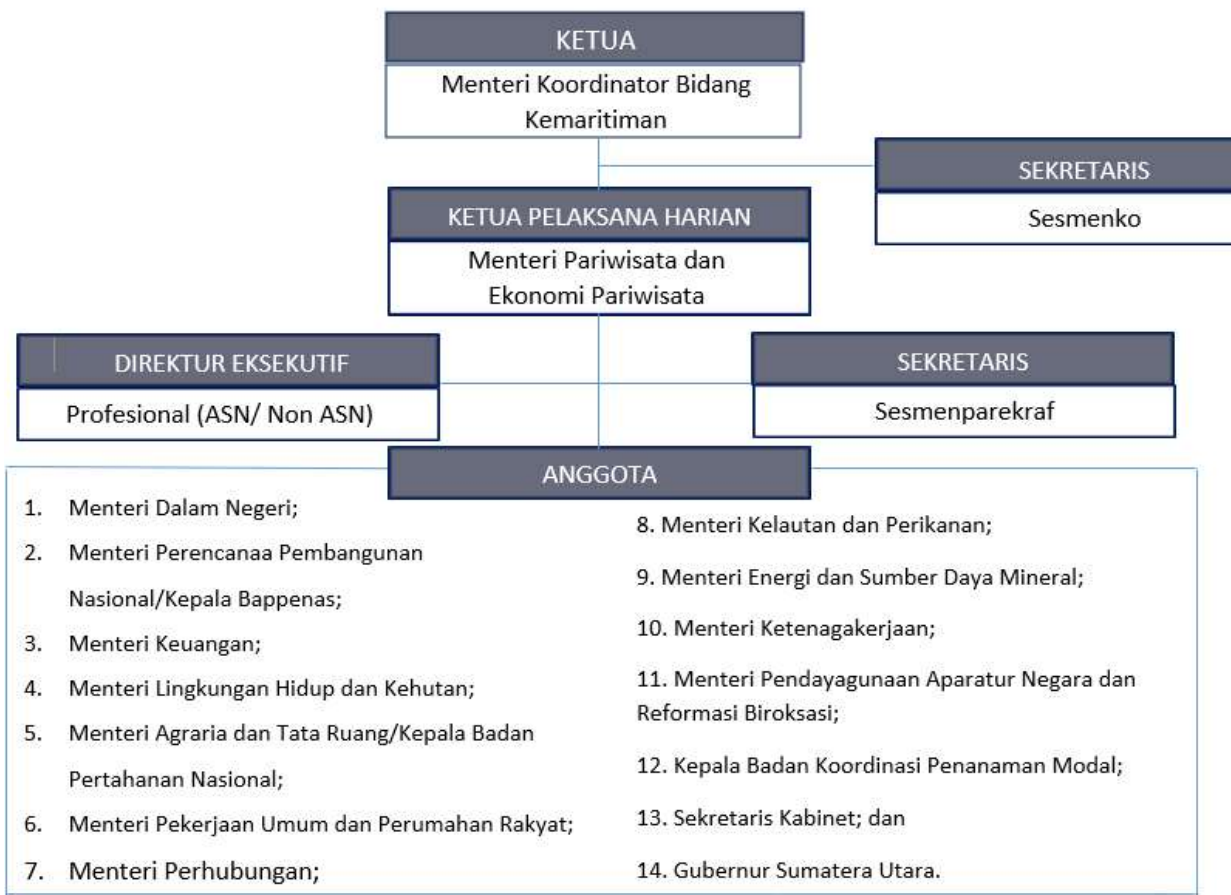
- a. Ketua merangkap anggota

- b. Ketua Pelaksana Harian merangkap anggota
- c. Anggota

Dewan Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- Menyinkronkan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sesuai dengan kebijakan umum pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan kedudukan Menteri Pariwisata sebagai Ketua Pelaksana. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 2. Struktur Dewan Pengarah BPODT

➤ **Badan Pelaksana**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, susunan Pelaksana Otorita Danau Toba dijelaskan pada bagan berikut:

Secara struktur, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik; mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.
- c. Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba dan

perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba di bidang industri dan Kelembagaan Pariwisata. Termasuk menyelenggarakan fungsi promosi investasi, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata.

d. Direktur Destinasi Pariwisata;

Direktur Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba di bidang Destinasi Pariwisata.

e. Direktur Pemasaran Pariwisata;

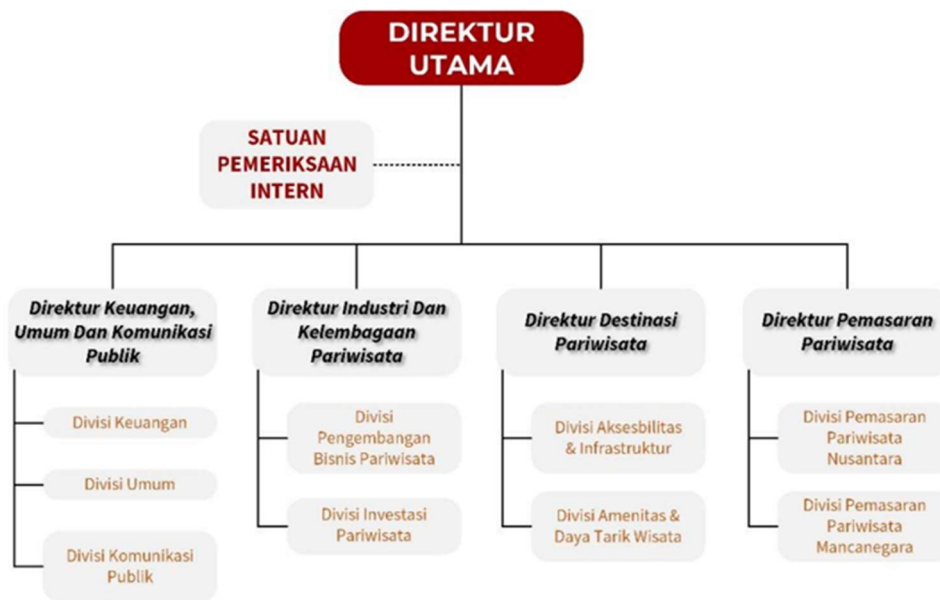
Direktur Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan strategi, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba di bidang Pemasaran Pariwisata.

f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Satuan Pemeriksaan Intern adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Badan Pelaksana harus memperhatikan aspirasi, budaya, karakteristik dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Danau Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Badan Pelaksana juga dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang dilakukan harus memiliki nilai strategis tertentu dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan Badan Pelaksana. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Otorita berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2016.



Gambar 3. Struktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

1.4. SUMBER DAYA

1. Jumlah Ketenagaan (Pegawai /Karyawan)

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang handal, profesional dan berdedikasi, perlu disusun peta kekuatan SDM yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, sehingga memudahkan pimpinan menempatkan SDM pada jabatan-jabatan atau bidang-bidang yang tepat sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian diharapkan garis-garis kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), SDM Badan Pelaksana Otorita Danau Toba terdiri dari PNS dan Staf Pelaksana BLU dan PTT di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diangkat berdasarkan SK Menteri Pariwisata dan SK Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau .

Sehubungan dengan hal tersebut disusun kekuatan SDM di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kategorisasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah SDM di Lingkungan BPODT

NO	SATUAN KERJA	DIREKSI DAN KADIV NON PNS	PNS	STAF PELAKSANA BLU	PTT	TOTAL SDM
1	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	6	13	18	42	79
TOTAL (ORG)						79

PNS Badan Pelaksana Otorita Danau Toba disusun berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Golongan

NO	SATUAN KERJA	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I
1	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	3	10		-

Jumlah SDM yang dikelompokkan berdasarkan Latar Belakang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. SDM BPODT Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

SATUAN KERJA	S3		S2		S1/ D.IV		D.III		SLTA		SLTP	
	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		1	4	5	9	54	-	3	-	3	-	-
TOTAL (ORG)		1	4	5	9	54	-	3	-	3	-	-

1.5. DATA KEUANGAN

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan BLU. Pagu Rupiah Murni merupakan pagu anggaran yang dialokasikan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Pendapatan BLU adalah penerimaan dari imbalan jasa layanan dan optimalisasi aset.

1. Pagu Anggaran dan Belanja yang bersumber dari Rupiah Murni

Pendapatan dan Realisasi Belanja Rupiah Murni Tahun 2020-2022 Pendapatan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang bersumber dari Rupiah Murni tahun 2022-2023.

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Belanja BPODT yang bersumber dari Rupiah Murni TA 2020 - 2022

No	Jenis Belanja	2021			2022			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4,958,362,000	4,751,755,842	95.83%	6,969,084,000	5,621,827,096	80.67%	5,817,586,000	5,631,485,599	96.80%
2	Belanja Barang	27,856,795,000	27,665,366,622	99.31%	28,639,792,000	28,556,334,245	99.71%	24,143,162,000	24,134,074,942	99.96%
3	Belanja Modal	64,192,949,000	64,155,452,476	99.94%	13,152,651,000	13,127,050,994	99.81%	2,780,000,000	2,775,219,535	99.83%
	Total	97,008,106,000	96,572,574,940	99.55%	48,761,527,000	47,305,212,335	97.01%	32,740,748,000	32,540,780,076	99.39%

Berdasarkan Tabel 5 di atas, Pagu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni mengalami penurunan, terutama pada tahun 2022 mengalami penurunan yang drastis. Hal ini karena pada 3 tahun terakhir, masa pandemi dan pasca pandemi yang mengharuskan fokus utama penganggaran adalah untuk kebangkitan ekonomi nasional. Oleh karena itu, anggaran BPODT ikut di *refocussing*.

Namun untuk realisasi belanja, persentase realisasi mengalami kenaikan setiap tahun, karena BPODT memiliki operasional serta tugas dan target yang harus di capai.

2. Pagu Anggaran dan Belanja yang bersumber dari BLU

BPODT sebagai Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, memiliki Pagu dan Belanja yang bersumber dari BLU, yang disajikan pada

Tabel 6. Pagu dan Belanja Anggaran yang bersumber dari BLU Tahun 2021 - 2023

No	Jenis Belanja	2021			2022			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
2	Belanja Barang	-	-	0%	2,865,542,000	2,861,491,454	99.86%	5,106,741,000	5,054,337,018	98.97%
3	Belanja Modal	-	-	0%	1,306,810,000	1,298,060,113	99.33%	828,610,000	822,314,850	99.24%
	Total	-	-	0%	4,172,352,000	4,159,551,567	99.69%	5,935,351,000	5,876,651,868	99.01%

Tahun 2021 – 2023 BPODT belum memperoleh pendapatan BLU sehingga, tidak ada anggaran yang dapat dibelanjakan. Kondisi ini dikarenakan The Kaldera yang masih di tutup pada masa-masa pandemi, sehingga sumber pendapatan belum ada.

Namun pada tahun 2022, pasca pandemi dan kondisi ekonomi yang perlahan – lahan membaik, BPODT mulai membuka The Kaldera. Sumber utama pendapatan BPODT diperoleh dari tiket masuk, parkir, dan glamping di The Kaldera. Dengan dibukanya The Kaldera, maka muncul biaya operasional dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan.

3. Target dan Relisasi Pendapatan BLU 2021 - 2022

Tabel 7. Target Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

No	Uraian	Kode Akun	2021			2022			2023		
			Target	Pendapatan	Realisasi Belanja	Target	Pendapatan	Realisasi Belanja	Target	Pendapatan	Realisasi Belanja
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pariwisata	424121	700,000,000	344,811,004	-	1,447,520,000	4,343,903,207	4,159,551,567	1,716,060,000	5,935,351,000	5,876,651,868
	Total		700,000,000	344,811,004	-	1,447,520,000	4,343,903,207	4,159,551,567	1,716,060,000	5,935,351,000	5,876,651,868

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Di tahun 2021 pendapatan BPODT tidak mencapai target BLU hal ini dikarenakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba baru melakukan launching Toba Kaldera Resort sebagai salah satu Objek Daya Tarik Wisata Per November 2021 (dibukanya di November 2021 hal ini dikarenakan Badan Pelaksana Otororita Danau Toba mesti mempersiapkan segala administrasi keuangan BLU aga Pengelolaan Keuangan BLU tertib secara administrative dari segi keuangan dimulai dari segi Pemilihan Bank Pengelolaan Rekening BLU, Pengusulan pembuatan rekening penampung penerimaan BLU, Pengusulan pembuatan rekening penerimaan BLU.

Ditahun 2021 meskipun telah mendapatkan Pendapatan dari BLU sebesar Rp. 344.811.004 namun Badan Pelaksana Otorita Danau Toba belum dapat menggunakan uang tersebut hal ini dikarenakan DIPA Badan Pelaksana Otorita Danau Toba belum DIPA BLU meskipun secara PMK BPODT telah ditetapkan menjadi salah satu satker yang mengguakan penerapan Keuangan BLU.

Pendapatan BLU di Tahun 2021 yang tidak dapat digunakan sehingga menjadi Saldo Awal BPODT di tahun 2022 sebesar Rp. 344.811.004 dan pendapatan BLU tahun 2022 melebihi target sebesar Rp 4.343.903.207. Sumber pendapatan BPODT di tahun 2022 diantaranya yaitu penggunaan layanan sarana dan prasarana yaitu Tiket Masuk, Parkir dan Sewa Cabin, dan sewa lahan serta sewa ATV.

Realisasi Belanja BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tahun 2022 sebesar Rp 4.159.551.567 dimana untuk mendukung Kegiatan Operasioanal Kaldera dan menambah atraksi wisata di Kaldera Resort diantaranya adalah melengkapi utilitas Cabin, Bell tent dan pengadaan ATV dalam meningkatkan Daya tarik wisata baru di Toba Caldera Resort.

Sementara pendapatan BLU di Tahun 2023 mengalami kenaikan. Yang di target Rp 1.716.060.000 dan mendapat PNPB sebesar Rp 5.935.351.000 yang melebihi target. Sumber pendapatan BPODT di tahun 2023 diantaranya yaitu penggunaan layanan sarana dan prasarana yaitu Tiket Masuk, Parkir dan Sewa Cabin, dan sewa lahan serta sewa ATV.

2.1. Sarana dan Prasarana Pendukung

Guna Menunjang Layanan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sesuai. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada SIMAK-BMN tahun 2023 sebagai mana pada tabel berikut ini: v

Tabel 8. Rekapitulasi Tanah Milik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Tidak Bergerak

No	Jenis	Jumlah	Nilai	Kondisi
1	Tanah	386,71 Ha	313.088.626.000	Baik
2	Gedung dan Bangunan	17	12.992.488.806	Baik dan Rusak Ringan
3	Jalan	3	672.988.970	Baik dan Rusak Ringan
4	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2	399.107.000	Baik dan Rusak Ringan
5	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2	199.782.000	Baik dan Rusak Ringan
6	Jaringan Listrik	4	789.982.735	Baik dan Rusak Ringan
7	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	97.731.000	Baik dan Rusak Ringan
	Total	29	328.240.706.511	

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Bergerak Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2023

No	Jenis	Jumlah	Nilai	Kondisi
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	26	4.629.604.125	Baik dan Rusak Ringan
2	Alat Angkutan Apung Bermotor	1	198.750.000	Baik dan Rusak Ringan
	Total	27	4.828.354.125	

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2023

DAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU 2024

2.1. Uraian Singkat Kinerja 2023

Pada Tahun 2023, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba melaksanakan program-program strategis dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata di kawasan Otorita Danau Toba. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba berkomitmen untuk menjadikan kawasan pariwisata danau toba menjadi destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan nusantara (wisnus), tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman). Oleh sebab itu dalam pengembangan kawasan pariwisata danau toba, BPODT menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berpedoman pada The World Tourism Organization (UNWTO) dan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Dalam perjalanan sepanjang Tahun 2023 terdapat blokir (automatic adjustment) anggaran gaji dan honorarium sebesar Rp. 2.171.796.000, namun pada pertengahan tahun 2023 anggaran tersebut ditarik oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Di saat yang sama, BPODT memperoleh penambahan anggaran dari relaksasi AA internal Kemenparekraf/Baparekraf sebesar Rp. 1.280.000.000. Selain anggaran Rupiah Murni, BPODT juga memanfaatkan pendapatan BLU sebesar Rp. 5.935.351.000 sampai dengan akhir tahun 2023 dengan mekanisme Top UP BLU sebanyak 5 (lima) kali dimana target awal pendapatan BLU sebesar Rp. 1.716.060.000. Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan ke kawasan Toba Caldera Resort

2.2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2023

a. Faktor Internal

Pelayanan

Tingkat pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelaksana Otoriat Danau Toba kepada para pelanggan/stakeholder mempengaruhi kinerja tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan tersebut antara lain:

- **Kualitas Pengelolaan Toba Caldera Resort**

Dengan semangat untuk tetap menindak lanjuti dan meneruskan cita-cita yang ingin mewujudkan visi dan misi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Kaldera Resort). Sinergi dalam pengelolaan mampu meningkatkan produktivitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Kaldera Resort) Berdasarkan pada evaluasi proses dan hasil kinerja sebelumnya, kami memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem kinerja, sehingga mampu membangun budaya kerja baru sesuai dengan komitmen bersama untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Kaldera Resort).

- **Kualitas Pelayanan Toba Caldera Resort**

Kualitas proses pelayanan di Toba Caldera Resort menjadi menjadi pilar utama terkait dengan Pelayanan di Toba Caldera Resort. Penerapan standar dalam penerapan Penjaminan Mutu Pelayanan mampu meningkatkan proses pelayanan di Toba Caldera Resort. Penyusunan standar-standar atau SOP Pelayanan menjadi hal yang sangat penting dalam penerpaan pelayana yang berkualitas.

Organisasi dan SDM

Kualitas SDM dan fungsi organisasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja tahun 2023 Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi organisasi dan SDM antara lain:

- ***Ketersediaan SDM Yang Cukup Memadai***

Sesuai dengan uraian diatas struktur organisasi di tingkat Manajemen di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dari setiap Direktorat mengalami perubahan yang semakin mendekatkan pada realita kegiatan. Kelengkapan personil dan unit-unit penunjang memberikan peluang penyebaran tanggung jawab sesuai kebutuhan pengembangan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Jumlah dan kualitas SDM Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik di Toba Caldera Resort. SDM di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berkembang baik dari jenjang kualifikasi pendidikan dan jumlah. Direksi & Kadiv Non PNS ada 6 Org, PNS 13 orang, Staf Pelaksana BLU 18 orang, Pegawai Tidak Tetap 42 orang dan Total Seluruh SDM Di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sejumlah 79 orang

- ***Hubungan & Kerjasama Organisasi (Internal dan Eksternal)***

Konsolidasi internal dilakukan secara terus-menerus dalam rangka membangun komunikasi organisasi yang berbasis pada nilai-nilai dasar utama organisasi yang telah disepakati. Hubungan dan kerjasama eksternal juga dibangun secara intensif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Membuka peluang-peluang kerjasama baru dalam meningkatkan proses investasi dan memanfaatkan asset dan membangun masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Kerjasama eksternal dilakukan dengan Lembaga Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Forum Komunikasi serta kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah dan beberapa industri untuk meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam meningkatkan pelayanan prima di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

- **Kesepakatan dalam Mewujudkan Visi dan Misi dan Menerapkan Nilai-Nilai Organisasi dalam membangun BUDaya Kerja Yang Lebih Baik**
Perubahan dalam pengelolaan instansi dimaknai sebagai membangun semangat dan energi baru dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Melalui proses perubahan sistem kerja yang didasari oleh perubahan nilai-nilai dasar organisasi memberikan harapan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

- **Citra Image Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Caldera Resort)**

Selama ini Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Kaldera Resort) masih kurang dikenal oleh dikenali oleh masyarakat namun setelah dibukanya Toba Caldera Resort untuk Umum dan semakin gencarnya melakukan promosi dari beberapa Sosial Media diantaranya Instagram, Tiktok dan Wesbite dan tidak itu juga beberapa hal yang dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menjalin kerja sama bersama Radio Del dalam mempromosikan Toba Caldera Resort hal ini untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan citra Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

- ***Persepsi Pengelola dan Pelaksana Pelayanan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Toba Caldera Resort)***

Persepsi pengelola dan pelaksanaan pelayanan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba khususnya SDM yang bertatap muka langsung dengan konsumen/pelanggan di Toba Kaldera Resort belum memiliki komitmen dan pola pikir untuk melayani konsumen dengan baik secara prima (masih bermental birokrat/ingin dilayani). Perubahan perilaku dan budaya kerja organisasi sangat didasari oleh perubahan pola pikir para pengelola dan para pelaksana organisasi. Membangun komitmen bersama untuk siap melayani merupakan suatu proses panjang. Merubah persepsi pengelola dari birokrat menjadi pelayanan prima melalui capacity building dan pelatihan hospitality dari Lembaga kepariwisataan. Monitoring pelaksanaan pelayanan prima melalui questioner kepuasan masyarakat dan kepuasan pelayanan publik yang dapat di peroleh secara online dimana barcode ini telah disebarakan melalui sosial media Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan di Kaldera Toba Resort.

Keuangan

Kondisi pengelolaan keuangan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang kemungkinan memiliki pengaruh pada pencapaian kinerja tahun 2022. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki dana BLU yang masih dikatakan sangat minim hal ini dikarenakan baru dimulai beroperasinya Kaldera Toba Resort Per Nov 2021, di tahun 2022 ini merupakan tahun ke 2 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mendapatkan penerimaan pendapatan BLU, suatu prestasi yang baik dimana di tahun 2022 ini pendapatan BLU mencapai 199% dari target Pendapatan BLU yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan suatu tantangan yang sangat penting bagi pengelola keuangan dimana dengan pendapatan yang cukup besar kedepannya dapat dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Tantangan BLU sendiri yaitu meningkatkan kemandirian BLU dimana nantinya anggaran yang bersumber dari rupiah murni semakin berkurang dan bagaimana meningkatkan pendapatan BLU agar menjadi sakter mandiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja keuangan antara lain:

- **Profesionalitas Tenga Pengelola Keuangan**

Sangat disadari bahwa pengelolaan keuangan merupakan roh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dalam hal ini dalam pengelolaan keuangan Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga yg expert dibidang keuangan dimana kedepannya tantangan keuangan semakin tinggi khususnya dalam pengelolaan keuangan BLU.

Adanya pelatihan atau pendidikan formal dibidang keuangan merupakan suatu yang sangat utama yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga keuangan di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

- **Sumber – Sumber Keuangan Institusi**

Sumber keuangan institusi yang selama ini di dapat dari DIPA (baik berupa RM maupun BLU/BLU), merupakan sumber utama keuangan institusi. Sumber dana rupiah murni diterima setiap tahun dari APBN dengan proporsi sebesar 96% menjadikan sumber dana rupiah murni menjadi sumber penerimaan utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dana selanjutnya adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum dengan

proporsi sebesar 4%. Saat ini Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih sangat bergantung dengan Anggaran Rupiah Murni (RM) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Harapannya kedepannya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dapat meningkatkan pendapatannya dengan fleksibel sesuai peraturan pertuan yang berlaku. Pendapatan Layanan Pendidikan menjadi porsi terbesar dari pendapatan BLU.

- **Sistem Pengelola Keuangan**

Sistem pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan pengalokasian, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan keuangan. Perubahan sistem pengelolaan keuangan yang dibangun dengan prinsip bottom up planning, memiliki manfaat yang cukup baik dalam membangun keterbukaan dan kebersamaan. Prinsip pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan support sistem dalam menunjang kegiatan institusi.

Di era Pandemi pada tahun 2019-2022 banyak mengajarkan perkembangan digitalisasi proses kerja jarak jauh, sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi pengelola keuangan kedepannya bagaimana bisa tetap bekerja dengan lebih efektif dan efisiensi meskipun jarak jauh dan proses pencairan keuangan tidak terhambat, maka daripada itu dibutuhkan suatu aplikasi e-keuangan yang diharapkan dapat mengakomodir sistem pengelolaan keuangan secara online. Dengan aplikasi e keuangan, pengajuan pembayaran/pencairan dana dilakukan secara daring. Diharapkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba terus berinovasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya.

- **Sistem Tata Kelola**

Sistem tata kelola dan aturan-aturan yang cukup ketat dalam penggunaan dana pemerintah, merupakan implementasi sistem pengendaliannya. Beberapa ketentuan dan aturan dalam tata kelola keuangan, merupakan prosedur yang dikembangkan, dengan menerapkan standar operasional prosedur/SOP dalam pelaksanaannya sehingga

mampu mempercepat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang benar dan tepat waktu.

Sarana dan Prasaran

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki tanah sebesar 386,72 Ha. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja sarana dan prasarana Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

- a. Aset tanah ada yang sudah memiliki sertifikat seluas 386,72 Ha namun sejumlah 107 ha masih dalam kondisi sengketa dengan masyarakat setempat dan dalam proses persidangan
- b. Kelengkapan sarana & fasilitas pendukung bagi wisatawan yang berkunjung ke Toba Caldera Resort masih belum terpenuhi diantaranya Mushola, tempat teduh (Gajebo) dan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan lain yang merupakan sarana pendukung bagi wisatawan yang terkena musibah selama dalam berkunjung
- c. Masih kurangnya atraksi daya tarik wisata yang dapat dilakukan wisatawan selama berkunjung di Toba Caldera Resort

b. Faktor Eksternal

• Undang- Undang

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- **Kebijakan Pemerintah**

Faktor-faktor dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
- c.. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
- d. Layanan Umum beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012
- e. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK,02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- k. Peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2006, tentang kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layana Umum
- l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- m. Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum;
- o. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
- p. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 164/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Keadaan Persaingan**

Kondisi persaingan saat ini dibidang pariwisata sangatlah kuat, dimana banyak daya tarik wisata yang baru bermunculan dengan menyajikan pelayanan yang lebih dan serta tawaran-tawaran investasi yang lebih menjanjikan sehingga saat ini sangat dibutuhkan inovasi-inovasi yang lebih menarik agar pelanggan serta para Investor lebih tetap minat untuk berwisata dan berinvestasi di Toba Caldera Resort. Apalagi di era industry 5.0 saat ini, tantangan persaingan semakin tinggi jika Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tidak dapat mengikuti perkembangan maka akan tertinggal jauh dari Destinasi-Destinasi lain di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor dari keadaan persaingan yang mempengaruhi kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

- a. Semakin banyaknya Objek Wisata/daya tarik/Destinasi Wisata yang baru dan lebih menjanjikan bagi wisatawan dan Investor
- b. Status Tanah Yang masih belum clear and Clean sehingga menjadi pertimbangan bagi para calon investor

- c. Tingginya standar profesi yang bertaraf internasional (SDM Pengelola Toba Caldera Resort) belum memadai dari segia kualitas dan kuantitas

- **Keadaan Perekonomian Nasional dan Internasional**

Kondisi perekonomian nasional dan internasional sangat mempengaruhi perkembangan usaha dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Apalagi dengan kondisi saat ini pasca pandemi covid 19 yang mempengaruhi ekonomi khususnya Indonesia saat ini, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba harus mampu melakukan inovasi-inovasi di tengah keterbatasan yang ada

Faktor-faktor dari keadaan perekonomian nasional dan internasional yang mempengaruhi kinerja

- a. Kondisi perekonomian internasional termasuk perekonomian di Indonesia yang tidak stabil selama pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
- b. Nilai tukar rupiah terhadap dollar yang berfluktuatif
- c. Pertumbuhan pesat iklim usaha di Indonesia

- **Perkembangan Sosial Budaya**

Pengaruh sosial budaya terhadap kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sangat kuat, karena masyarakat Indonesia umumnya memiliki keterikutan dengan faktor sosial budaya yang selalu berkembang. Beberapa diantaranya mengenai:

- Wisatawan yang berkunjung lebih didominasi dengan wisatawan millennial, ini sangat berpengaruh sekali dengan tingkat kunjungan wisatawan di Toba Caldera Resort khusus The Nomadic Escape dimana kaum-kaum muda millennial lebih mau berkunjung dengan obyek wisata/destinasi wisata terbaru dan lebih menarik (yang update/viral). Tantangan bagi pengelola Toba Caldera Resort/Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bagaimana tetap mempertahankan sesuatu yang unik dan tidak ada didapati/dirasakan/dialami oleh konsumen/pelanggan di tempat lain.

- **Perkembangan Teknologi**

Untuk menjadi suatu destinasi yang prioritas tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang mutakhir. Saat ini dengan perkembangan teknologi di Era 5.0 dimana setiap orang hanya mengandalkan HP sudah semakin mudah menadapatkan segala informasi yang diinginkan maka dari pada itu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini maka Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mesti dapat mengikuti era digitalisasi ini diantaranya pemesanan tiket masuk secara online, sistem pembayaran online (tidak ada pembayaram secara tunai lagi) serta penyajian data segala informasi terkait Toba Caldera Resort didapatin melalui media sosial. Sehingga hal ini sangat membantu calon-calon investor untuk dapat berinvestasi di Toba Caldera Resort.

adalah beberapa faktor-faktor dari perkembangan tekhnologi yang memicu kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba:

- a. Perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi mendorong perkembangan profesionalisme dan efektivitas kinerja
- b. Pelayanan teknologi informasi dengan menggunakan multimedia yang mutakhir
- c. Sistem Informasi yang teritegrasi dari mulai penyajian data informasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Toba Caldera Resort (dari segi investasi, promosi daya tarik wisata, pemesanan tiket, pembayaran serta evaluasi kepuasan pelanggan)

c. Asumsi -Asumsi Yang digunakan

- **Asumsi Makro**

Asumsi makro yang digunakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%
- Inflasi 3,6%
- Nilai Tukar (Rp/US\$) Rp 14.800

- **Asumsi Mikro**

- a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- c. Asumsi tarif;
- d. Asumsi volume pelayanan;
- e. Pengembangan pelayanan baru

Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima Oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba . Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. namun karena badan Pelaksana Otorita Danau Toba baru 2 tahun berjalan menerima pendapatan dari BLU sehingga sangat sekarang ini sangat membutuhkan subsidi dari Pemerintah dimana 95% sumber penerimaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bersumber dari APBN Rupiah Murni.

- **Asumsi Tarif**

Penyusunan asumsi tarif didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 tahun 2020 tentang Tarif Badan Layanan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menerbitkan Peraturan Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tentang Tarif Layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Tarif yang tersedia diharapkan mampu mengakomodir seluruh layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan bersaing secara profesional. Tarif Layanan juga digunakan sebagai dasar perhitungan proyeksi penerimaan tahun-tahun berikutnya.

2.3. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

A. Uraian Kontrak Uraian Indikator Kerja Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

1. Realisasi jumlah PNBP

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Modern
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi PNBP BLU
Deskripsi	:	PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN
Formula	:	Jumlah seluruh PNBP BLU yang disahkan ke Kuasa BUN sebagai pendapatan BLU, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember

2. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	:	Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Modern
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
Deskripsi	:	Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Formula	:	Persentase Capaian = Persentase Penyelesaian Tahapan + Persentase Kecepatan Penyelesaian Capaian kecepatan penyelesaian dihitung berdasarkan kriteria masing-masing tahapan. Norma waktu masing-masing tahapan dapat berupa bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan

Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.
--------	---	--

3. Pembangunan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort

Sasaran Strategis	:	Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	:	Pembangunan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort
Deskripsi	:	Infrastruktur Fisik adalah segala sarana dan prasarana yang disiapkan oleh BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam menunjang fungsi Toba Caldera Resort sebagai kawasan pariwisata. IKU ini digunakan untuk mengukur ketercapaian dalam penyediaan infrastruktur fisik di Toba Caldera Resort
Formula	:	Menghitung Presentase Pembangunan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort $\frac{\sum \text{Penyediaan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort}}{\sum \text{Target Penyediaan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort}} \times 100\%$ Kriteria penyelesaian pembangunan adalah telah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari penyedia kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai pengelola kawasan pariwisata secara berkelanjutan

4. Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pihak Ketiga

Sasaran Strategis	:	Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	:	Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pihak Ketiga
Deskripsi	:	Merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses kerjasama operasional dengan

		lembaga/badan usaha, dengan melakukan perjanjian kontrak kerja sama dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan lahan di Toba Caldera Resort
Formula	:	Menghitung Presentase Kerjasama Operasional atas lahan otoritatif yang dilaksanakan BPODT dengan pihak ketiga dengan target $\frac{\sum \text{Kerja Sama Operasi yang dilaksanakan di Toba Caldera Resort}}{\sum \text{Target Kerja Sama Operasi di Toba Caldera Resort}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu kinerja BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai pengelola kawasan untuk dapat melakukan kerjasama operasional dengan lembaga/badan usaha dalam rangka pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Toba Caldera Resort

Sasaran Strategis	:	Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	:	Terselenggaranya Layanan di Bidang Pariwisata yang berkelanjutan
Deskripsi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di Toba Caldera Resort berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formula	:	Hasil Pengukuran IKM:			
		Indeks Kuantitatif		Indeks Kualitatif	
		Skala 1-4	Skala 1-100	Predikat	Predikat
		1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
		2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
		3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
Tujuan	:	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
		IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan			

6. Penyelenggaraan Event Pariwisata di Toba Caldera Resort

Sasaran Strategis	:	Layanan Prima BLU
Indikator Kinerja Utama	:	Penyelenggaraan Event Pariwisata di Toba Caldera Resort
Deskripsi	:	Event Pariwisata merupakan kegiatan berupa pameran, pertunjukan, festival, maupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan mendatangkan wisatawan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai pengelola kawasan melalui penyelenggaraan event pariwisata di kawasan Toba Caldera Resort sebagai salah satu upaya dan daya tarik yang dapat meningkatkan kunjungan ke Toba Caldera Resort
Formula	:	Menghitung Presentase Penyelenggaraan Event Pariwisata di Toba Caldera Resort $\frac{\sum \text{Event Pariwisata di Toba Caldera Resort Tahun 2022}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Event Pariwisata di Toba Caldera Resort}} \times 100\%$

Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai pengelola kawasan pariwisata secara berkelanjutan
--------	---	--

7. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPKBLU

Sasaran Strategis	:	Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPKBLU
Deskripsi	:	Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPK BLU, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Formula/Keterangan	:	Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPK BLU, dihitung sebagai berikut : $= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi}}{\text{Jumlah temuan hasil monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.

B. Indikator Kinerja BLU Tahun 2024

Sehubungan dengan upaya untuk menjaga kualitas dan kontinuitas layanan BLU kepada para pemangku kepentingan melalui pola pengelolaan keuangan BLU, maka berdasarkan Pasal 28 PP Nomor 23 Tahun 2005, Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Capaian Kontrak Kinerja tahun 2022 – 2023 dan Proyeksi tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Proyeksi
			TA 2022		TA 2023		TA 2024
1.	Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern	Realisasi PNPB BLU	Rp 1.447.520.000,-	Rp 4.255.198.00,-	Rp 1.716.060.000,-	Rp 5.652.354.643,-	Rp 7.200.000.000,-
		Persentase Penyelesaian Modernisasi BLU	100%	104%	100%	100%	100%
2.	Layanan Prima BLU	Pembangunan Infrastruktur Fisik di Toba Caldera Resort	3 Unit	7 unit	100 %	100 %	100 %
		Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Pihak Ketiga	100 %	75%	100 %	100 %	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan di Toba Caldera Resort	-	-	3.3 (Skala Likert)	3.3 (Skala Likert)	3.5 (Skala Likert)
		Penyelenggaraan Event Pariwisata di Toba Caldera Resort	13 Event	13 Event	100 %	100 %	100 %
3.	Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat (PPK BLU) secara Tepat Waktu yang Memadai sesuai dengan Ketentuan	100%	-	90%	90%	95%

Tabel 11. Kontrak Kinerja BLU BPODT Tahun 2022 dan Prognosa Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

2.4. Rencana Pagu Anggaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2024

Tabel 12. Rencana Pagu Anggaran BPODT Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK		SDM ULA				KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK		M EN JA RI		M EN JA RI							
			TARGET	PAGU INDIKATIF	ALOKASI ANGRAN							TARGE T	SATUAN	PAGU ANGRAN	ALOKASI ANGRAN				
															VOLUME	SATUAN	RM	B U L	
																		RM	BLU
			(a+b)	a	b			(c+f)	c	d	e	f = d + e							
41832	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		Rp 38.196,522,000	Rp 36,284,362,000	Rp 1,912,160,000	418327	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		Rp 41,651,395,000	Rp 36,284,362,000	Rp 1,912,160,000	Rp 3,454,873,000	Rp 5,367,033,000						
EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		Rp 9,500,000,000	Rp 7,887,840,000	Rp 1,612,160,000	EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		Rp 12,954,873,000	Rp 7,887,840,000	Rp 1,612,160,000	Rp 3,454,873,000	Rp 5,847,033,000						
2802	Pengelolaan Kawasan Pariwisata		Rp 9,500,000,000	Rp 7,887,840,000	Rp 1,612,160,000	2802	Pengelolaan Kawasan Pariwisata		Rp 12,954,873,000	Rp 7,887,840,000	Rp 1,612,160,000	Rp 3,454,873,000	Rp 5,847,033,000						
PEH	Promosi	3	Kegiatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,000,000,000	PEH	Promosi	Kegiatan	Rp 5,197,436,000	Rp 2,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,697,436,000	Rp 3,197,436,000						
PEH.00	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3	Kegiatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,000,000,000	PEH.001	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	3	Kegiatan	Rp 5,197,436,000	Rp 2,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,697,436,000						
051	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara	2	Kegiatan	Rp 1,700,000,000	Rp 1,200,000,000	051	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara	2	Kegiatan	Rp 1,700,000,000	Rp 1,200,000,000	Rp 500,000,000		Rp 500,000,000					
052	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mancanegara	1	Kegiatan	Rp 800,000,000	Rp 800,000,000	052	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mancanegara	1	Kegiatan	Rp 3,497,436,000	Rp 800,000,000		Rp 2,697,436,000	Rp 2,697,436,000					
PEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,450,000,000	PEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,450,000,000	Rp 50,000,000		Rp 50,000,000					
PEC.00	Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita danau Toba	2	Kesepakatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,450,000,000	PEC.001	Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita danau Toba	2	Kesepakatan	Rp 2,500,000,000	Rp 2,450,000,000	Rp 50,000,000		Rp 50,000,000					
051	Facilitas dan Promosi Investasi	1	Kesepakatan	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	051	Facilitas dan Promosi Investasi	1	Kesepakatan	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000								
052	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Kesepakatan	Rp 1,500,000,000	Rp 1,450,000,000	052	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Kesepakatan	Rp 1,500,000,000	Rp 1,450,000,000	Rp 50,000,000		Rp 50,000,000					
ODG	Facilitas dan Pembinaan UMKM	1	UMKM	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	ODG	Facilitas dan Pembinaan UMKM	1	UMKM	Rp 507,437,000	Rp 250,000,000		Rp 257,437,000	Rp 257,437,000					
ODG.00	SDM dan Industri Pariwisata yang Mendorong Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1	UMKM	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	ODG.001	SDM dan Industri Pariwisata yang Mendorong Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1	UMKM	Rp 507,437,000	Rp 250,000,000	Rp	Rp 257,437,000	Rp 257,437,000					
051	Pembinaan UMKM	1	UMKM	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000	051	Pembinaan UMKM	1	UMKM	Rp 377,437,000	Rp 120,000,000		Rp 257,437,000	Rp 257,437,000					
052	Pengelolaan Kaldera			Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	052	Pengelolaan Kaldera		Rp 130,000,000	Rp 130,000,000									
DCL	Penelitian Bidang Ekonomi Kreatif (KRO BARU)	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000	Rp -	DCL	Penelitian Bidang Ekonomi Kreatif (KRO BARU)	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000	Rp -	Rp 250,000,000		Rp 250,000,000					
DCL.00	Penelitian SDM Bidang Ekonomi Kreatif Di Kawasan Pariwisata Danau Toba	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000	Rp -	DCL.001	Penelitian SDM Bidang Ekonomi Kreatif Di Kawasan Pariwisata Danau Toba	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000	Rp -	Rp 250,000,000		Rp 250,000,000					
051	Peningkatan SDM Bidang Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000		051	Peningkatan SDM Bidang Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata	100	Orang, kegiatan	Rp 250,000,000		Rp 250,000,000		Rp 250,000,000					
AEA	Koordinasi	3	Kegiatan	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	AEA	Koordinasi	3	Kegiatan	Rp 850,000,000	Rp 750,000,000		Rp 100,000,000	Rp 100,000,000					
AEA.00	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, danAmentias Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	3	Kegiatan	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	AEA.001	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, danAmentias Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	3	Kegiatan	Rp 850,000,000	Rp 750,000,000		Rp 100,000,000	Rp 100,000,000					
051	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, danAmentias Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	3	Kegiatan	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	051	Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, danAmentias Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	3	Kegiatan	Rp 850,000,000	Rp 750,000,000		Rp 100,000,000	Rp 100,000,000					
CAM	Sarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	CAM	Sarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	Rp 812,160,000		Rp 812,160,000					
CAM.00	Pengadaan Sarana di Destinasi Toba Caldera Resort	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	CAM.001	Pengadaan Sarana di Destinasi Toba Caldera Resort	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	Rp 812,160,000		Rp 812,160,000					
051	Pengadaan Sarana Pariwisata	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	051	Pengadaan Sarana Pariwisata	5	Unit	Rp 1,500,000,000	Rp 687,840,000	Rp 812,160,000		Rp 812,160,000					
RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1	Unit	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1	Unit	Rp 2,150,000,000	Rp 1,750,000,000		Rp 400,000,000	Rp 400,000,000					
RBN.00	Amentias, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otorita Badan Otorita Danau Toba	1	Unit	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000	RBN.001	Amentias, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otorita Badan Otorita Danau Toba	1	Unit	Rp 2,150,000,000	Rp 1,750,000,000		Rp 400,000,000	Rp 400,000,000					
051	Pengembangan Amentias dan Aksesibilitas di Kawasan Otorita	1	Unit	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000	051	Pengembangan Amentias dan Aksesibilitas di Kawasan Otorita	1	Unit	Rp 2,150,000,000	Rp 1,750,000,000		Rp 400,000,000	Rp 400,000,000					
WA	Program Dukungan Manajemen	1	Kegiatan	Rp 28,696,522,000	Rp 28,396,522,000	WA	Program Dukungan Manajemen	1	Kegiatan	Rp 28,696,522,000	Rp 28,396,522,000	Rp 300,000,000		Rp 300,000,000					
6240	Program Dukungan Manajemen			Rp 28,696,522,000	Rp 28,396,522,000	6240	Program Dukungan Manajemen			Rp 28,696,522,000	Rp 28,396,522,000	Rp 300,000,000		Rp 300,000,000					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	LAYANAN	Rp 23,303,270,000	Rp 23,303,270,000	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	LAYANAN	Rp 23,303,270,000	Rp 23,303,270,000								
EBA.95	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	LAYANAN	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	LAYANAN	Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000								
051	Hubungan Masyarakat dan komunikasi			Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000	051	Hubungan Masyarakat dan komunikasi			Rp 1,450,000,000	Rp 1,450,000,000								
EBA.96	Layanan Umum	1	LAYANAN	Rp 2,548,836,000	Rp 2,548,836,000	EBA.962	Layanan Umum	1	LAYANAN	Rp 2,548,836,000	Rp 2,548,836,000								
051	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga danPerawatan			Rp 2,548,836,000	Rp 2,548,836,000	051	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga danPerawatan			Rp 2,548,836,000	Rp 2,548,836,000								
EBA.99	Layanan Perkantoran	1	LAYANAN	Rp 19,307,434,000	Rp 19,307,434,000	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	LAYANAN	Rp 19,307,434,000	Rp 19,307,434,000								
001	Gaji dan Tunjangan			Rp 7,478,434,000	Rp 7,478,434,000	001	Gaji dan Tunjangan			Rp 7,478,434,000	Rp 7,478,434,000								
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Rp 11,829,000,000	Rp 11,829,000,000	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Rp 11,829,000,000	Rp 11,829,000,000								
EB9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50	Unit	Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000	EB9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50	Unit	Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000								
EB9.95	Layanan Sarana Internal	50	Unit	Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000	EB9.951	Layanan Sarana Internal	50	Unit	Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000								
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000	051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			Rp 2,212,160,000	Rp 2,212,160,000								
EB9	Layanan Manajemen SDM Internal	95	ORANG	Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	EB9	Layanan Manajemen SDM Internal	95	ORANG	Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	Rp 300,000,000		Rp 300,000,000					
EB9.95	Layanan Manajemen SDM	95	ORANG	Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	EB9.954	Layanan Manajemen SDM	95	ORANG	Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	Rp 300,000,000		Rp 300,000,000					
051	Pengelolaan Kepegawaian			Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	051	Pengelolaan Kepegawaian			Rp 1,037,421,000	Rp 1,037,421,000	Rp 300,000,000		Rp 300,000,000					
EB9	Layanan Manajemen Kinerja	4	Dokumen	Rp 1,493,671,000	Rp 1,493,671,000	EB9	Layanan Manajemen Kinerja	4	Dokumen	Rp 1,493,671,000	Rp 1,493,671,000								
EB9.95	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	EB9.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000								
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba			Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba			Rp 500,000,000	Rp 500,000,000								
EB9.95	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	EB9.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000								
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			Rp 500,000,000	Rp 500,000,000								
EB9.95	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	Rp 493,671,000	Rp 493,671,000	EB9.956	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	Rp 493,671,000	Rp 493,671,000								
051	Pengelolaan Perbendaharaan			Rp 493,671,000	Rp 493,671,000	051	Pengelolaan Perbendaharaan			Rp 493,671,000	Rp 493,671,000								
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	Unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	Unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000								
CAN.001	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi	15	Unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	CAN.001	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi	15	Unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000								
051	Pengadaan Sarana TIK & Internal BPODT	15	unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	051	Pengadaan Sarana TIK & Internal BPODT	15	unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000								
CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000								
CCL.00	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000								
051	Pemeliharaan TIK	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	051	Pemeliharaan TIK	50	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000								

Keseluruhan anggaran yang tersedia digunakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba melalui target kinerja tahunan. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki 2 (Dua) sumber dana untuk

memenuhi kebutuhan dalam memenuhi target kinerja tahunannya, yaitu sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Badan Layanan Umum. Sumber dana rupiah murni merupakan given dari APBN yang sangat sulit di proyeksikan berapa perolehan setiap tahunnya. Sedangkan sumber dana BLU merupakan hasil pendapatan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang tentunya turut mempengaruhi target kinerja. Jika Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih memperoleh dana APBN secara rutin, maka Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tetap dapat berkinerja secara maksimal. Atas hal tersebut sumber BLU harus diproyeksikan sedetail dan teliti berikut disajikan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima tahun 2021-2024

Tabel 13. Rencana Pendapatan BLU Tahun 2022-2024

No	Sumber Pendapatan	Satuan	Jumlah Pemasukan tahun 2022	Jumlah Pemasukan tahun 2023
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (424121)				
I	LAYANAN PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUANGAN			
1	Sewa tanah di Caldera Resort	M2		
2	Sewa ruang serbaguna (untuk weeding)	Unit		
3	Sewa cabin untuk menginap	Unit		
4	Penggunaan harian fasilitas outdoor	Hari	IDR 48.000.000,00	IDR 72.000.000,00
5	Sewa UMKM	Unit/bulan	IDR 6.000.000,00	IDR 6.000.000,00
6	Sewa pusat kebudayaan di Caldera Resort	Unit/jam	IDR 19.200.000,00	IDR 19.200.000,00
7	Sewa ruang untuk MICE di Caldera Resort	Unit/jam		IDR -
II	LAYANAN PENGGUNAAN SARPRAS WISATA		IDR -	IDR -
A	Tiket Masuk Kawasan		IDR -	IDR -
1	Tiket masuk kendaraan Bis	Unit/masuk	IDR 5.040.000,00	IDR 5.040.000,00
2	Tiket masuk pengunjung penumpang bis	Orang/masuk	IDR 147.420.000,00	IDR 147.420.000,00
3	Tiket masuk kendaraan Mobil Pribadi	Unit/masuk	IDR 61.200.000,00	IDR 61.200.000,00
4	Tiket masuk pengunjung penumpang mobil pribadi	Orang/masuk	IDR 367.200.000,00	IDR 367.200.000,00
5	Tiket masuk kendaraan sepeda motor pribadi	Unit/masuk	IDR 78.000.000,00	IDR 84.000.000,00
6	Tiket masuk pengunjung penumpang motor pribadi	Orang/masuk	IDR 467.460.000,00	IDR 504.000.000,00
7	Sarana Glamour Camping	Unit/malam	IDR 48.000.000,00	IDR 50.000.000,00
III	LAYANAN PENUNJANG		IDR -	IDR -
1	Kerja Sama Operasional (KSO) kawasan Caldera Resort	Kontrak/Tahun	IDR 200.000.000,00	IDR 400.000.000,00
TOTAL			IDR 1.447.520.000,00	IDR 1.716.060.000,00

PROYEKSI PNBP 2024

BULAN	TIEKT MASUK	PARKIR	ATV	AKOMODASI(CABIN & BELLTENT)	KERJASAMA OPERASIONAL	SEWA LAHAN	LAYANAN PENUNJANG	TOTAL
JANUARI	749,604,395.00	125,769,395.00	17,550,000.00	28,182,767.00			6,605,000.00	Rp 927,711,557.00
FEBRUARI	402,350,000.00	70,435,000.00			124,539,300.00			Rp 597,324,300.00
MARET	187,350,785.00	36,355,000.00	22,350,000.00	19,447,887.00	82,491,444.00		1,000,000.00	Rp 348,995,116.00
APRIL	815,135,000.00	130,785,000.00						Rp 945,920,000.00
MEI	379,550,000.00	60,330,000.00			110.00			Rp 439,880,110.00
JUNI	311,130,000.00	54,100,000.00				30,000,000.00	36,000.00	Rp 395,266,000.00
JULI	749,604,395.00	125,769,395.00	17,550,000.00	28,182,767.00			6,605,000.00	Rp 927,711,557.00
AGUSTUS	402,350,000.00	76,415,834.00			124,539,300.00			Rp 603,305,134.00

SEPTEMBER	187,350,785.00	36,355,000.00	22,350,000.00	19,447,887.00	82,491,444.00		1,000,000.00	Rp	348,995,116.00
OKTOBER	200,000,000.00	125,740,000.00						Rp	325,740,000.00
NOVEMBER	379,550,000.00	60,330,000.00			110.00			Rp	439,880,110.00
DESEMBER	815,135,000.00	54,100,000.00				30,000,000.00	36,000.00	Rp	899,271,000.00
	Rp 5,579,110,360.00	Rp 956,484,624.00	Rp 79,800,000.00	Rp 95,261,308.00	Rp 414,061,708.00	Rp 60,000,000.00	Rp 15,282,000.00	Rp	7,200,000,000.00

Pendapatan Layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di proyeksikan terus meningkat sampai dengan tahun 2023. Pendapatan Layanan BLU terdiri dari Pengelolaan Kawasan Pariwisata dimana sumber pendapatan dari layanan penggunaan tanah, bangunan dan Gedung, Layanan Penggunaan penggunaan sarana wisata (tiket kendaraan, tiket masuk dan sarana glamour camping) serta Layanan penunjang Lainnya yaitu KSO (Kerja Sama Operasional) Kawasan Caldera Resort. Secara detail, rekapitulasi target pendapatan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tahun 2022- 2024 disajikan sesuai data diatas.

1. Informasi lainnya yang perlu disampaikan Pencapaian Program Investasi

Badan Pelaksana Otorita Danau menjadi BLU sejak April 2019 dan per Nov 2021 baru mendapatkan penerimaan BLU, namun saat ini karena Pendapatan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih kecil sehingga hanya cukup untuk memenuhi dukungan operasional Layanan BLU di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sehingga belum bisa menyusun rencana program investasi kedepannya.

2. Ambang Batas Belanja BLU

Untuk Ambang Batas saat ini Badan Pelaksana Otorita Danau Toba belum menetapkan ambang batas, namun dalam perjalanannya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba akan mengajukan ambang batas sebesar 20% dan melakukan perubahan pendapatan BLU sesuai dengan pendapatan yang telah tercapai.

3. Prakiraan Maju

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen berlaku. Prakiraan maju belanja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

2.2. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

Penerimaan

No.	Rincian	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	Rp 1,447,520,000	Rp 4,255,198,207	294%	Pendapat BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	Rp 64,434,362,000	Rp 48,761,527,000	76%	Adanya anggaran yang di Automatic Adjustment sehingga tidak dapat digunakan
	Total	Rp 65,881,882,000	Rp 53,016,725,207	80%	

Belanja

No.	Rincian	Target	Prognosa	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	Rp 1,447,520,000	Rp 4,255,198,207	Rp 4,172,352,000	288%	Pendapat BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	Rp 64,434,362,000	Rp 48,761,527,000	Rp 47,305,212,335	73%	Adanya anggaran yang di Automatic Adjustment
	Total	Rp 65,881,882,000	Rp 53,016,725,207	Rp 51,477,564,335	78%	

2.3. RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2023

Penerimaan

No.	Rincian	Target	Prognosa	Proyeksi Realisasi s/d Desember	Persentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	Rp 1,716,060,000	Rp 4,733,361,649	Rp 5,192,416,428	303%	Pendapat BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	Rp 32,740,748,000	Rp 32,740,748,000	Rp 32,740,748,000	100%	Adanya anggaran yang di Automatic Adjustment sehingga tidak dapat digunakan
	Total	Rp 34,456,808,000	Rp 37,474,109,649	Rp 37,933,164,428	101%	

Belanja

No.	Rincian	Target	Prognosa	Proyeksi Realisasi s/d Desember	Persentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	Rp 1,716,060,000	Rp 2,965,351,000	Rp 3,558,421,200	207%	Pendapat BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	Rp 32,740,748,000	Rp 32,740,748,000	Rp 32,085,933,040	98%	Adanya anggaran yang di Automatic Adjustment sehingga tidak dapat digunakan
	Total	Rp 34,456,808,000	Rp 35,706,099,000	Rp 35,644,354,240	100%	

2.4. PROYEKSI RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

Penerimaan

No	Keterangan	Target	Proyeksi	Realisasi s/d Desember	Presentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	100	Pendapatan BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	33,632,544,000	33,632,544,000	33,632,544,000	100	
	Total Penerimaan	40,832,544,000	40,832,544,000	40,832,544,000	100	

Belanja

No	Keterangan	Target	Proyeksi	Realisasi s/d Desember	Presentase	Keterangan
1	Pendapatan BLU	5,367,032,391	5,367,032,391	5,367,032,391	100	Pendapatan BLU yang diperoleh melebihi target
2	Rupiah Murni	33,632,544,000	32,287,242,240	32,287,242,240	96	Adanya anggaran yang di Automatic Adjusment sehingga tidak dapat digunakan
	Total Penerimaan	38,999,576,391	37,654,274,631	37,654,274,631	96	

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Pencapaian Kinerja tahun 2024 diharapkan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah tercermin dari capaian kinerja semester I tahun 2024 dan beberapa prognosa kinerja tahun 2024. Pencapaian kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba merupakan bagian dari implementasi dari Rencana Strategis BPODT tahun 2022-2025. Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) diharapkan menjadi semangat baru bagi pencapaian renstra lima tahunan pada masa pandemi ini. Seluruh jajaran manajemen dalam organisasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, mulai dari Dirut, Direksi, Divisi, Staff berperan aktif serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Pelaksanaan Renstra di unit kerja sangat penting artinya dalam mendukung kinerja PK- BLU kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (RBA PK-BLU Poltekkes Medan). RBA BLU kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (performance plan) yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (action plan). Penetapan anggaran dan rencana kerja operasional

merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Hasil implementasi perencanaan program dan anggaran yang tertuang dalam RBA BLU kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala dan akan dilaporkan kepada stakeholder dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau sehingga seluruh pihak dapat mengakses pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana Otorita Danau dengan mudah, cepat, dan akurat.

3.2. Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Badan Layanan Umum kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan Kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Medan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba merupakan salah termasuk dalam 5 DSP (Destinasi Superprioritas) namun dari segi anggaran masih sangat minim dalam membangun infrastruktur Dasar Pada Toba Caldera Resort dimana ditahun berjalan anggaran tahun 2023 terdapat anggaran dalam AA “Automatid Adjusment” sehingga minimnya anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan tidak bisa dilaksanakan dan terkait pembangunan gedung kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tidak bisa diselesaikan 100%.
- b. Dengan meningkatnya pendapatan BLU ditahun 2023 melebihi target pendapatan yang telah direncanakan pada DIPA Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2023 hal ini menjadi tantangan bagi pengelola keuangan

BLU disamping perlu upgrading pengetahuan terkait tata kelola keuangan BLU serta tambahn SDM dibidang keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Disamping itu juga disamping dengan meningkatnya pendapatan BLU suatu hal yang penting bagi pengelola keuangan dalam memperbaiki perencanaan keuangan kedepannya dari mulai penggunaan anggaran BLU dalam meningkatkan pelayanan operasional BLU di Toba Caldera Resort serta merencanakan investasi anggaran BLU dengan mengembangkan beberapa alternative bisnis lainnya.

- c. Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia di masing-masing divisi antara direktorat, Secara kuantitas, jumlah pegawai di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba masih belum sesuai standar, dimana jumlah Pegawai PNS masih sangat minim dibandingkan dengan pegawai non PNS, disamping itu juga semua pegawai dapat di tingkatkan kapabilitasnya. Dan masih perlunya pengembangan serta pembenahan SDM yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu meminimalisir hambatan ini.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, upaya yang dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ke depan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menyusun cascading yang sesuai standar yang diharapkan dengan merekrut profesional cascading di bidangnya. Selanjutnya melalui sistem cascading yang telah tertata akan di lanjutkan dengan aplikasi yang mendukungnya, Sehingga dengan hal tersebut diharapkan kinerja benar-benar dapat terukur. Baik kinerja masing- masing pegawai ataupun insititusi secara keseluruhan.